

**PERBANDINGAN PERAN AKTIVIS PEREMPUAN ANTAR GENERASI
PRA MILENIAL DENGAN MILENIAL UNTUK MENCAPAI KESETARAAN
GENDER**

A. SRI WULANDANI THAMRIN

P072191001



**PROGRAM STUDI JENDER DAN PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR, INDONESIA**

2023

**COMPARISON OF THE ROLE OF FEMALE ACTIVIST BETWEEN PRE-
MILLENIAL AND MILLENIAL GENERATIONS TO ACHIEVE GENDER
EQUALITY**

A. SRI WULANDANI THAMRIN

P072191001



GENDER AND DEVELOPMENT STUDIES PROGRAM

GRADUATE PROGRAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR, INDONESIA

2023

**PERBANDINGAN PERAN AKTIVIS PEREMPUAN ANTAR GENERASI
PRA MILENIAL DENGAN MILENIAL UNTUK MENCAPAI KESETARAAN
GENDER**

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Jender dan Pembangunan

Disusun dan diajukan oleh

A. SRI WULANDANI THAMRIN

P072191001

kepada

**PROGRAM STUDI JENDER DAN PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PERBANDINGAN PERAN AKTIVIS PEREMPUAN ANTAR GENERASI PRA MILENIAL DENGAN MILENIAL UNTUK MENCAPAI KESETARAAN GENDER

Disusun dan diajukan oleh :

A. SRI WULANDANI THAMRIN
P072191001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Jender dan Pembangunan
Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 14 Maret 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Ir. Mardiana E. Fachry, M.Si.

Prof. Dr. Ir. Eymal Bashar Demmalino, M.Si.

Nip : 19590707 19850 3 2002

Nip : 19640815 19900 2 1001

Ketua Program Studi
Jender dan Pembangunan

Dekan Sekolah Pascasarjana,
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Nursini, S.E., MA.

Prof. dr. Budu., Ph.D.Sp.M(K).M.MedEd.

Nip : 19660717 199103 2 001

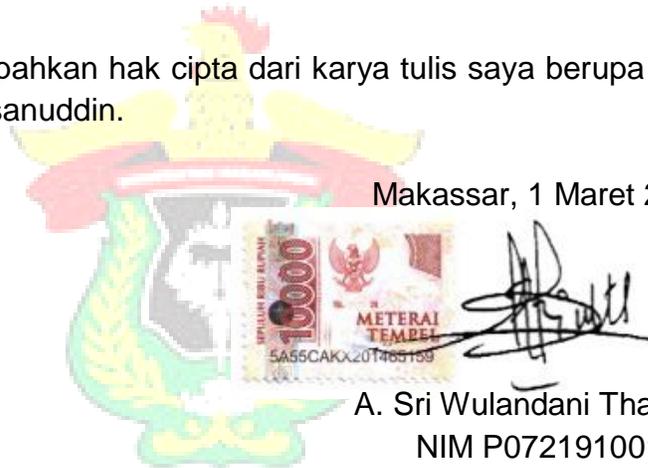
Nip : 19661231 199503 1 009

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul “Perbandingan Peran Aktivistis Perempuan Antar Generasi Pra Milenial dengan Milenial Untuk Mencapai Kesetaraan Gender” adalah benar karya saya dengan arahan dari Komisi Pembimbing (Prof. Dr. Ir. Mardiana E. Fachry, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Prof. Dr. Ir. Eymal Bashar Demmalino, M.Si sebagai Pembimbing Pendamping). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dikirim ke Jurnal Lectora.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 1 Maret 2023



A. Sri Wulandani Thamrin
NIM P072191001

Ucapan Terima Kasih

Saya bersyukur bahwa tesis ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan sukses dan tesis ini dapat terampungkan atas bimbingan, diskusi dan arahan Prof. Dr. Ir. Mardiana E. Fachry, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Prof. Dr. Ir. Eymal Bashar Demmalino, M.Si sebagai Pembimbing Pendamping. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada mereka. Penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada Ketua Program Studi Jender dan Pembangunan, Prof. Dr. Nursini, S.E, M.A yang selalu memotivasi saya untuk segera menyelesaikan Magister saya.

Terima kasih juga kepada segenap Aktivis Perempuan Sulawesi Selatan yang telah menjadi informan kunci dalam penelitian saya ini. Kepada Institute of Community Justice (ICJ) Makassar beserta tim ICJ Makassar, terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis saya ini. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Pimpinan Universitas Hasanuddin dan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah memfasilitasi saya menempuh program Magister serta para dosen dan pegawai akademik Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Akhirnya kepada kedua orang tua saya tercinta, saudara-saudari saya, kedua anak saya, Asiyah dan Selma dan segenap keluarga besar, saya mengucapkan terima kasih berkat doa dan dukungan mereka saya termotivasi dalam menyelesaikan studi saya. Semoga apa yang telah saya tempuh, lalui dan dapatkan ini mendapat keberkahan dari Allah SWT.

Penulis,

A. Sri Wulandani Thamrin

ABSTRAK

A. SRI WULANDANI THAMRIN. *Perbandingan Peran Aktivis Perempuan Antar Generasi Pra Milenial dengan Milenial untuk Mencapai Kesetaraan Gender* (dibimbing oleh **Mardiana Etrawaty Fachry dan Eymal Bashar Demmallino**)

Rentang waktu yang berbeda menghasilkan kelompok-kelompok perempuan atau aktivis perempuan baik individu, kelompok maupun organisasi dengan bentuk, strategi dan tujuan perjuangan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan motivasi lahirnya aktivis perempuan pra-milenial dan aktivis perempuan milenial untuk mencapai kesetaraan gender dan menjelaskan perbandingan peran aktivis perempuan pra-milenial dan aktivis perempuan milenial untuk mencapai kesetaraan gender. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi melalui teknik wawancara menggunakan instrumen penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah aktivis perempuan di wilayah Makassar dengan rentang kelahiran tahun 1960 – 1980 untuk generasi pra-milenial dan rentang kelahiran tahun 1980 – 2000 untuk generasi milenial. Informan yang dipilih adalah mereka yang tergabung dalam organisasi, lembaga, yayasan atau kelompok yang memperjuangkan kesetaraan gender dalam 3 tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivis perempuan pra-milenial dan pra-milenial memiliki kecenderungan motivasi yang sama. Kedua generasi ini sering menghadapi ketidakadilan dan tindak kekerasan di sekitar mereka. Isu yang diangkat oleh para penggiat generasi pra-milenial jauh lebih beragam, termasuk mengangkat isu keragaman sosial yang tidak diangkat oleh generasi milenial. LGBT dan SOGIESC diusung oleh generasi milenial, dimana isu ini belum menyentuh para aktivis pra-milenial. Kesimpulan: penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kendala yang dialami oleh aktivis perempuan pra-milenial dan milenial yaitu masih adanya budaya patriarki dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang gender, sehingga pencapaian kesetaraan gender masih perlu diperjuangkan.

Kata Kunci: Aktivis Perempuan, Pra milenial, Milenial

ABSTRACT

A. SRI WULANDANI THAMRIN. *Comparison of the Role of Female Activists Between Pre-Millennial and Millennial Generations to Achieve Gender Equality* (supervised by **Mardiana Etrawaty Fachry** and **Eymal Bashar Demmalino**).

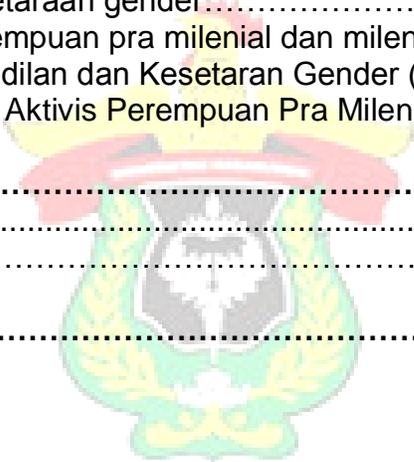
Different timeframes have produced women's groups or women's activists, both individuals, groups and organizations with different forms, strategies and goals of struggle according to the era. This study aims to explain the motivation for the birth of pre-millennial women activists and millennial women activists to achieve gender equality and explain the comparison of the strategic roles of pre-millennial women activists and millennial women activists to achieve gender equality. The research method uses descriptive qualitative with a phenomenological approach through interview techniques using research instruments. The informants in this study were women activists in the Makassar area with a birth range of the years 1960 – 1980 for the pre-millennial generation and a birth range of the years 1980 – 2000 for the millennial generation. The selected informants are those who are members of organizations, institutions, foundations or groups that have fought for gender equality in the last three years. The results of the study show that pre-millennial and pre-millennial women activists have the same motivational tendencies. Both generations often face injustice and violence around them. Issues raised by activists of the pre-millennial generation are far more diverse, including raising issues of social diversity that are not raised by the millennial generation. LGBT and SOGIESC are promoted by the millennial generation, where this issue has not touched pre-millennial activists. The conclusion of this research shows that there are obstacles experienced by pre-millennial and millennial women activists, namely the existence of a patriarchal culture and a lack of knowledge and awareness about gender that cause the achievement of gender equality still needs to be fought for.

Keywords: Female activists, Pre-millennials, Millennials

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Penelitian Terdahulu	24
B. Landasan Teori.....	29
C. Kerangka Konsep.....	35
D. Kerangka Pikir.....	40
BAB III. METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Motivasi lahirnya perjuangan dari aktivis perempuan pra milenial dengan aktivis perempuan milenial dalam rangka mencapai kesetaran gender	46
1. Perjuangan perempuan pra kemerdekaan; melawan Belanda dan menentang adat kawin cerai, perkawinan dini serta poligami.....	49

2. Domestikasi organisasi perempuan di masa Orde Baru dan lahirnya organisasi perempuan kiri serta LSM.....	51
3. Munculnya aktivis perempuan pra milenial dan aktivis Perempuan milenial dalam memperjuangkan keadilan dan Kesetaraan gender.....	53
4. Alasan aktivis perempuan melibatkan diri dalam isu keadilan dan kesetaraan gender.....	57
B. Perbandingan Peran Aktivis Perempuan Pra Milenial dengan Aktivis Perempuan Milenial.....	59
1. Perbedaan Karakteristik Aktivis Perempuan Pra Milenial dengan Milenial.....	51
2. Isu yang diperjuangkan di Lembaga.....	61
3. Relevansi Isu yang diperjuangkan aktivis pra milenial dengan milenial dengan isu Kesetaraan dan Keadilan Gender.....	62
4. Alasan aktivis perempuan melibatkan diri dalam isu keadilan dan kesetaraan gender.....	63
5. Peran aktivis perempuan pra milenial dan milenial dalam mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG).....	65
6. Media Kampanye Aktivis Perempuan Pra Milenial dan Milenial	67
BAB VI PENUTUP	70
1. Kesimpulan	71
2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72



DAFTAR TABEL

Nomor Urut	Halaman
1. Rentang Tahun Kelahiran Pra-millennial dan Millennial.....	49
2. Jumlah Informan Kunci Per-Rentang Tahun Kelahiran.....	49
3. Perbedaan posisi strategis di institusi/lembaga antara aktivis perempuan pre-millennial dan aktivis perempuan milenial.....	59
4. Jumlah aktivis perempuan (informan kunci) di posisi-posisi strategis.....	59
5. Kluster Isu yang diperjuangkan Aktivis Pra Milenial dan Milenial.....	61



DAFTAR GAMBAR

Nomor Urut	Halaman
1. Kluster Posisi Aktivistis Perempuan di Lembaga.....	60
2. Kluster penjelasan posisi aktivis perempuan pra milenial dan milenial	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen dalam pencapaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Indonesia memiliki tekad untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, sebab Indonesia juga memiliki andil dalam melahirkan SDGs. SDGs merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals* atau yang dikenal dengan nama MDGs. MDGs disepakati oleh negara-negara yang menjadi anggota PBB sejak tahun 2000 kemudian MDGs ini berakhir pada akhir tahun 2015 dan digantikan oleh SDGs..

SDGs atau yang disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) memiliki tujuan di antaranya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan atau berkesinambungan, menjaga bagaimana kehidupan sosial masyarakat berkelanjutan, bagaimana menjaga kualitas dari lingkungan hidup serta pembangunan inklusif serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. (Bappenas, Sekilas SDG's, 2021)

Berdasarkan dari laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2015 melalui Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan di

Kota New York pada 25 September 2015 menghasilkan ketetapan SDGs atau Agenda Pembangunan Berkelanjutan dimana SDGs ini berisi 17 tujuan dan 169 target rencana aksi global dalam jangka waktu 15 tahun yaitu dari 2015 sampai tahun 2030 (Susanty, 2020)

Ada 17 tujuan dari SDGs yang mana 17 tujuan tersebut adalah; (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. (Bappenas, Sekilas SDG's, 2021)

Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, 17 tujuan dan 169 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu :

1. Pilar pertama adalah Pilar Pembangunan sosial yang meliputi tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5 dari SDGs
2. Pilar kedua adalah Pilar Pembangunan ekonomi yang meliputi tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17 dari SDGs

3. Pilar ketiga adalah Pilar Pembangunan lingkungan yang meliputi tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15 dari SDGs
4. Pilar keempat adalah Pilar pembangunan hukum yang meliputi tata kelola yaitu tujuan 16 dari SDGs

Disebutkan dalam pemaparan Bappenas bahwa SDGs merupakan penyempurnaan dari MDGs sehingga ada beberapa agenda dari MDGs yang belum mencapai goalnya akan diteruskan ke dalam SDGs sampai pada tahun 2030. Beberapa alasannya di antaranya adalah (Bappenas, Sekilas SDG's, 2021) :

1. SDGs disusun melibatkan banyak negara untuk negara maju dan berkembang dan disusun lebih komprehensif dengan tujuan yang universal
2. Dengan SDGs maka sumber pendanaan diperluas sehingga pendanaan selain bersumber dari bantuan negara maju juga bersumber dari sumber daya swasta
3. SDGs menekankan pada hak asasi manusia dengan harapan tidak terjadi diskriminasi utamanya dalam menangani kemiskinan dalam segala dimensi
4. SDGs menyoal kelompok rentan dan bersifat Inklusif secara spesifik dengan jargon *No One Left Behind*
5. Adanya pelibatan seluruh stakeholder atau yang disebut dengan pemangku kepentingan yang unsur-unsurnya terdiri dari pemerintah,

legislatif atau parlemen, dunia usaha, filantropi, professional atau pakar, akademisi, media dan organisasi masyarakat.

6. Dalam MDGs target hanya menysasar setengah atau sebagian sedangkan SDGs memiliki target menuntaskan seluruhnya atau *Zero Goals*
7. SDGs memuat sasaran pelaksanaan atau *Means Of Implementation* bukan hanya tujuan

Untuk penggunaan istilah antara SDGs atau TPB digunakan untuk; penggunaan istilah Sustainable Development Goals (SDGs) ditujukan untuk secara umum semisalnya dalam kegiatan-kegiatan, pelatihan, workshop, seminar, persentasi, sedangkan istilah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) digunakan dalam hal dokumentasi pemerintah agar mudah dipahami.

Penyelarasan tujuan dan target yang dilakukan Negara Indonesia berkenaan dengan SDGs ini dilakukan dengan menyelaraskan agenda-agenda pembangunan nasional baik yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024, pemerintah Republik Indonesia telah memberikan perhatian kepada SDGs. Indonesia telah menyusun sebuah peta jalan atau yang disebut dengan istilah *Road Map* yang mana disusun secara komprehensif dan sifatnya inklusi serta memakai strategi pembiayaan dan perkiraan pendanaan. Dalam RPJMN juga pemerintah

memberikan perhatian kepada Pengarusutamaan Gender (PUG) dimana hal ini menjadi sebuah strategi pemerintah nasional dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional dan mewujudkan tujuan kelima dari SDGs yaitu kesetaraan gender.

Strategi pemerintah nasional ini dilakukan dengan mengintegrasikan atau memasukkan perspektif gender dalam proses perencanaan pembangunan, penganggarannya, pelaksanaannya, pemantauannya dan evaluasi atas kebijakan dari program dan kegiatan pembangunan nasional (Bappenas, Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024, 2019)

Sedangkan dalam Peraturan Presiden (PP) No. 59 tahun 2017 didalamnya termuat komitmen negara dalam melaksanakan SDGs. Sesuai peraturan itu, pelaksanaan SDGs secara inklusif dipimpin oleh Presiden sebagai Kepala Negara (Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Arifin Rudiyanto, 2019) (Kompas.com, 2019).

Dalam pencapaian MDGs, Indonesia berhasil mencapai sebagian besar targetnya yaitu 49 indikator dari jumlah keseluruhan 67 indikator. (Bappenas, Sekilas SDG's, 2021). Ada beberapa indikator yang masih harus dilanjutkan oleh Indonesia di antaranya penurunan angka kemiskinan, peningkatan konsumsi minimum, penurunan angka kematian Ibu, penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi. Dalam situs resmi PBB, Indonesia telah sukses mencapai Millenium Development Programme (MDP)

dengan target pengurangan angka kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dasar dan mengurangi kasus kemunculan penyakit tertentu. (Ratnasari, 2017). Pencapaian itu membuat Indonesia mulai melangkah menuju 17 capaian dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Adapun capaian ke-lima dalam SDGs itu adalah mencapai kesetaraan gender.

Tujuan kelima dari SDGs dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan meningkatkan pemberdayaan perempuan sehingga hal ini mengandung pengertian bahwa segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan sehingga kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya di segala bidang dapat mudah dicapai.

Menurut hasil kajian indikator lintas sektor yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dengan judul Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia tahun 2016 ada beberapa target yang akan dicapai Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tujuan kelima dari SDGs, yaitu; (1) bagaimana mengakhiri diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam segala bentuk, dimanapun dengan indikator adanya jumlah kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan responsif gender, (2) Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan baik di ruang publik maupun ruang privat termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual serta jenis eksploitasi lainnya dengan indikator; (a) proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (15 – 64 tahun) yang mengalami

kekerasan baik fisik, seksual maupun emosional yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir dengan ukuran prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan, (b) proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (15 – 64 tahun) yang mengalami kekerasan baik fisik, seksual maupun emosional yang dilakukan oleh orang lain selain oleh pasangan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir dengan indikator persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan layanan komprehensif.

Selain itu, target pemerintah; (3) bagaimana menghapuskan segala bentuk praktik yang berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan pernikahan paksa serta sunat perempuan dengan indikator; (a) Persentase perempuan yang berusia 20 – 24 tahun dengan status kawin atau berstatus hidup bersama sebelum usianya 15 tahun dan sebelum berusia 18 tahun dan (b) persentase perempuan yang usianya 15-49 tahun yang sudah menjalani FGM/C (*Female Genital Mutilation/ Cutting*) menurut kelompok umur.

Target yang lainnya adalah; (4) bagaimana mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional dengan indikator proporsi waktu yang telah dihabiskan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan perawatan berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur dan lokasi. Selain itu (5)

bagaimana menjamin perempuan dapat berpartisipasi penuh dan efektif serta mengambil kesempatan yang sama untuk dapat memimpin di semua tingkatan pengambilan keputusan baik itu dalam dimensi kehidupan politik, ekonomi dan sosial masyarakat dengan indikator jumlah atau proporsi kursi yang diduduki perempuan baik itu di parlemen tingkat pusat atau DPR dan di parlemen tingkat daerah atau DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota serta jumlah atau proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial.

Pemerintah juga menargetkan bagaimana (6) jaminan atas akses universal terhadap kesehatan seksual, kesehatan reproduksi dan hak reproduksi sesuai yang telah disepakati dalam *Programme of Action of The International Conference on Population and Development and The Beijing Platform* dengan indikator jumlah atau proporsi perempuan dengan usia 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. Indikator lainnya berkaitan dengan kebijakan yaitu Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang memberi jaminan kepada perempuan yang berusia 15-49 tahun dalam mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.

Target yang lainnya dari pemerintah yaitu (7) melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan akan akses terhadap sumber daya ekonomi, akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam sesuai

dengan hukum nasional dengan indikator jumlah atau proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian, proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki lahan pertanian menurut jenis kepemilikan, proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol. Target yang lainnya adalah bagaimana meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan peningkatan pemberdayaan perempuan khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun capaian utama dari pembangunan terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG mengalami peningkatan dari 90,82 di tahun 2016 menjadi 94,48 di tahun 2019. Hal ini berarti kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki semakin mengecil di beberapa bidang pembangunan. Sementara itu, IDG meningkat dari 71,39 di tahun 2016 menjadi 78,32 di tahun 2019 (<https://www.bps.go.id/>, 2022).

Namun, menurut Lampiran Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 terdapat beberapa kesenjangan gender yang masih terjadi di Indonesia. Data yang ada menunjukkan kesenjangan di bidang pendidikan masih banyak terjadi. Anak perempuan memiliki rata-rata lama sekolah yang jauh lebih rendah dibanding anak laki-laki yaitu 7,65 tahun dan 8,56 tahun (Susenas, 2017). Terdapat 25,62 persen anak perempuan yang tidak memiliki ijazah

dibanding anak laki-laki 24,04 persen. Anak laki-laki yang telah lulus SMA atau telah tamat SMA ke atas sebanyak 48,83 persen jumlahnya lebih banyak dibanding perempuan (42,92 persen) (KemenPPPA dan BPS, 2019). Putus sekolah menyebabkan anak perempuan rentan mengalami perkawinan anak yang kemudian efek kerugian yang akan dialami lebih besar dan panjang.

Untuk mewujudkan kesetaraan gender di bidang pendidikan perlu memperhatikan akses terhadap fasilitas pendidikan, kesetaraan dalam mengambil keputusan pendidikan, dan kesetaraan dalam penerimaan manfaat pendidikan (Sardjunani, 2009) (Rahayu, 2011).

Indikator kesetaraan gender dalam perspektif pendidikan dapat dilihat dari : 1) Bagaimana akses untuk ke sekolah bagi anak laki-laki dan anak perempuan, 2) Proses pembelajaran pendidikan antara lain mengenai infrastruktur : jumlah sekolah, jumlah guru, buku pelajaran, metode pengajaran dan lokasi sekolah dari jangkauan masyarakat, 3) *Outcomes* : manfaat ilmu pengetahuan dan lapangan kerja.

Pembangunan kesehatan termasuk tujuan ketiga dari SDGs yaitu mengenai Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Secara nasional, pencapaian SDGs perkembangannya dapat dilaporkan melalui *Voluntary National Review (VNR)*. VNR ini membahas beberapa indikator penting dari SDGs yaitu mengenai kematian ibu dan bayi, penyakit menular dan tidak menular, kesehatan reproduksi, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tenaga kesehatan, obat dan vaksin. Berdasarkan data tempat tinggal, angka persentase

perempuan di wilayah pedesaan yang melahirkan bukan di fasilitas kesehatan jauh lebih tinggi dibandingkan yang melahirkan di perkotaan (27,89 persen berbanding 8,23 persen). (KemenPPPA dan BPS, 2019).

Ini membuktikan bahwa status kesehatan perempuan di Indonesia masih rendah sebab Angka Kematian Ibu masih tergolong tinggi, yaitu 305/100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015). Untuk penyakit menular, jumlah ibu rumah tangga (IRT) yang tertular HIV/AIDS jumlahnya meningkat. Jumlah penderita AIDS tertinggi adalah IRT, mencapai 16.405 orang (Kementerian Kesehatan, 2018). Ini juga sebuah fakta yang miris sebab ibu rumah tangga kecenderungan aktivitasnya bukan di publik, namun di domestik namun yang paling banyak tertular HIV/AIDS adalah IRT.

Untuk bidang ketenagakerjaan, upah yang diterima oleh buruh perempuan masih lebih rendah daripada buruh laki-laki. Rata-rata upah yang diterima oleh buruh perempuan tiap bulannya adalah sebesar 2,4 juta rupiah sedangkan upah yang diterima oleh buruh laki-laki sebesar 3,06 juta rupiah (Sakernas, 2018). Pada sektor kerja formal masih didominasi oleh pekerja atau tenaga kerja laki-laki yaitu sebanyak 45,66 persen sementara perempuan jumlahnya 38,63 persen.

Selain itu, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu TPAK perempuan masih ada *gap* dengan TPAK laki-laki. TPAK laki-laki sebesar 82,69 persen sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 51,88 persen (Sakernas, Agustus 2018). Padahal

jika kita melihat sejarah di tahun 1980-an, tercatat lebih dari 2/5 angkatan kerja itu adalah perempuan mulai dari usia 18 sampai dengan 64 tahun. Namun dikatakan dalam Jurnal Perempuan No. 94 melalui buku Juliet Mitchell, *Woman's Estate* (1971), telah terjadi perubahan sejarah dari kerja perempuan dan perubahan tersebut harus diletakkan bersama dengan sejarah reproduksi. Nur Iman Subono dalam Kata dan Makna (Jurnal Perempuan No. 94) menulis :

“..lebih dari tiga dasawarsa terjadi penyingkiran perempuan dari dunia kerja di ranah publik melalui diberlakukannya berbagai peraturan dan menurut kalangan feminis hal tersebut merupakan contoh dari kolaborasi antara kapitalisme dengan patriarki. Akibatnya banyak perempuan yang kemudian “hanya” bekerja di dunia domestik atau masuk dalam dunia kerja informal. Masalahnya sebagaimana dinyatakan Andrienne Rich dalam bukunya *Of Woman Born : Motherhood as Experience and Institution* (1976), bahwa umumnya kerja domestik perempuan tidak pernah dipahami sebagai kerja” (Subono, 2017)

Di bidang politik, keterwakilan perempuan masih rendah. Secara makro, keterlibatan maupun partisipasi perempuan pada dimensi politik terbilang rendah. Di lembaga legislatif, terjadi penurunan tren dari 23 persen menjadi 17 persen. Ibu Yohana Yambise selaku Menteri PPPA memiliki target agar kesetaraan gender tercapai di tahun 2020. Di lembaga-lembaga eksekutif,

proporsi perempuan yang menduduki jabatan structural Eselon I-V hanya 31,96 persen dibandingkan laki-laki 68,03 persen (BKN, 2017).

Dalam bidang hukum, belum memadainya regulasi yang dapat melindungi perempuan. Kesadaran gender masih minim pada aparat penegak hukum dan secara umum masyarakat juga belum sadar hukum sehingga terkadang *law in book* tidak sama dengan *law in action*. Ketimpangan juga masih terjadi di beberapa bidang-bidang lainnya, untuk itu diperlukan penguatan pada kelembagaan dan pelebagaan Pengarus Utamaan Gender dengan memperhatikan tujuh prasyarat Pengarus Utamaan Gender (PUG) yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, alat analisis, data terpilah, dan dukungan publik. Integrasi gender di dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik di tingkat pusat dan daerah dibutuhkan.

Saat ini kita menghadapi masa dimana *Internet Of Everything*. Dari internet segala aspek kehidupan berjalan. Yang dulunya internet hanya ada di warung-warung internet dan hanya dapat diakses oleh segelintir orang karena pada tahun 1990-an, internet merupakan sesuatu yang mahal dan langka, namun saat ini melalui *Smartphone* semua dapat dikendalikan hanya dengan jari. Hampir semua kalangan dan lapisan masyarakat memiliki Handphone yang dijuluki canggih tersebut. Anak muda yang disebut sebagai anak milenial memegang peranan penting di masa ini, sebab sebagian besar pengguna aplikasi di dunia maya adalah mereka.

Aplikasi Youtube paling banyak digemari oleh pengguna media sosial di Indonesia. Usia pengguna berkisar antara 16 – 64 tahun dengan persentase akses Youtube sebesar 88 persen. Waktu (akumulatif) yang dihabiskan untuk menggunakan media sosial berkisar 3 jam 26 menit dengan 37 persen dialokasikan untuk bekerja. Aplikasi media sosial Whatsapp juga diakses sebesar 84 persen, Facebook sebesar 82 persen dan Instagram sebesar 79 persen. Dari total penduduk Indonesia 268,2 juta penduduk terdapat sebesar 56 persen atau sekitar 150 juta yang aktif menggunakan media sosial (Digital Around The World, 2019).

Dari hasil riset yang dilakukan per Januari 2018 sampai Januari 2019, disebut generasi milenial yang mendominasi penggunaan media sosial. Usia dominan berkisar antara 18 – 24 tahun. Dari usia tersebut, laki-laki mendominasi sebesar 18 persen, sedangkan perempuan 14 persen.

Dalam tujuan SDGs, tujuan keempat dan kesembilan, yaitu pendidikan berkualitas (tujuan keempat) dan industri, inovasi dan infrastruktur (tujuan kesembilan), tujuan ini erat kaitannya dengan teknologi sebagai alat guna. Sedangkan salah satu mandat dalam wacana kesetaraan adalah pentingnya perempuan untuk menguasai Sains, Teknologi, dan Inovasi (STI) yang merupakan tujuan kelima dari SDGs yaitu kesetaraan gender. Bahwa perempuan penting terlibat dalam *Science, Technology, Engineering, dan Mathematics* (STEM).

Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan banyaknya sumber informasi melalui media sosial yang arusnya begitu cepat. Era ini diwarnai oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), internet serba cepat dan segala bentuk inovasi yang termanifestasi dalam beragam bentuk aplikasi serba guna dan serba cepat. Untuk itu, perjuangan perempuan saat ini memiliki tantangan. Jika dahulu, perjuangan perempuan membela tanah air melalui perjuangan melawan penjajah Belanda dan Jepang kemudian mencapai puncaknya pada saat diskursus gender dan feminisme masuk ke Indonesia maka saat ini diperlukan peranan yang lebih strategis lagi guna menguatkan perjuangan yang telah diwariskan pejuang dahulu.

Pasang surut perjuangan perempuan telah melewati banyak periode. Sejarah perjuangan perempuan di Indonesia banyak ditulis oleh peneliti yang berasal dari luar negeri seperti Cora Vreede-de Stuers, Saskia Wieringa, Elsbeth Locher-Scholten, Susan Blackburn, dan Jean Gelman Taylor. Dalam bukunya yang berjudul *Kuntilanak Wangi; Organisasi-organisasi Perempuan Sesudah Tahun 1950 (The Perfumed Nigthmare)*, Saskia Wierenga memberikan gambaran potret mengenai sejarah gerakan perempuan dari sejak tahun 1950 hingga memasuki abad 20.

Sepanjang akhir abad ke-19 dan menjelang abad ke-20 muncul banyak epos perjuangan perempuan yang terinspirasi oleh jejak perjuangan Kartini. Perhatian utama mereka adalah perjuangan bersenjata melawan Belanda bersama sang suami. Cut Nyak Dien (1848) dan Cut Meutia adalah tokoh

perempuan di Aceh. Di Jawa, Roro Gusik membantu suaminya, Untung Surapati, mengangkat senjata. Di Maluku, Martha Tiahahu membantu Pattimura memberontak. Dan di Sulawesi Selatan, Emmy Saelan giat dalam perlawanan bersama Wolter Monginsidi. (Kuntilanak Wangi; Organisasi-organisasi Perempuan Sesudah Tahun 1950 [The Perfumed Nighthmare], 1998).

Sebagaimana pendapat yang lazim, Saskia Wieringa juga memiliki pandangan bahwa RA. Kartini (1879) merupakan tokoh nasional yang menginisiasi lahirnya gerakan perempuan di Indonesia. Saskia merujuk pada banyak literatur dan juga menyatakan bahwa Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh, pejuang dan perempuan feminis pada zamannya.

Memasuki tahun 1900-an, terdapat kebijakan etis kolonial Belanda yang membuka sekolah-sekolah modern dengan para aktivis perempuan sebagai pendiri sekolah tersebut yang berasal dari kalangan priyayi maupun pegawai birokrasi kolonial. Di masa ini, perjuangan perempuan melakukan kritis terhadap adat kawin cerai (menentang perkawinan dini, hak bercerai dan menentang poligami) yang merendahkan keluarga dan perempuan-perempuan kemudian berjuang untuk menuju pada identitas nasionalnya.

Pada masa kolonial ini perempuan dikonstruksi sebagai pemangku keturunan dan laki-laki sebagai tiang keturunan. Ada tiga nama perempuan yang dijuluki "Ibu Bangsa" yang memiliki kontribusi di masa pendidikan Taman Siswa, mereka adalah Sutartinah, istri Ki Hajar Dewantara, Sri Sulandari

Mangunsarkoro dan Siti Sukaptinah (Diskusi Perempuan dalam sejarah awal kebangsaan, 2018).

Pada saat itu Suratinah mendorong hak atas pendidikan bagi kaum perempuan. Sedangkan Nyi Sri Sulandari Mangunsarkoro memberi perhatian pada isu poligami dan Siti Sukaptinah memiliki peran dalam mendorong serta menggerakkan arah perjuangan perempuan pada advokasi pemerintahan.

Di tahun 1912 berdiri organisasi perempuan pertama bernama Poetri Mardika yang masih bertalian dengan Boedi Utomo (1928) lalu ada Wanita Oetomo. Di tahun 1917, berdiri Aisyiyah, seksi perempuan Islam Muhammadiyah diikuti pula organisasi perempuan Kristen dan Katolik. Kemudian Kongres Perempuan Indonesia Nasional pertama diselenggarakan di Yogyakarta pada bulan Desember tahun 1928 setelah itu terdapat Persatoean Perempoean Indonesia (PPI), yang merupakan federasi organisasi-organisasi perempuan Indonesia. Pada tahun berikutnya, nama federasi ini diubah menjadi Perikatan Perhimpunan Isteri Indonesia (PPII). Di tahun 1930 berdiri Isteri Sedar. Di tahun 1930, masa pergerakan nasional disebut mengubah pemikiran para gadis untuk berjuang, mereka didoktrin menjadi ibu bagi keluarga dan masyarakat.

Sejak akhir dasawarsa tahun 1950-an, terdapat dua organisasi perempuan kiri yang mulai memperoleh kedudukan penting. Secara genealogis, organisasi Gerwani berawal dari Gerakan Wanita Isteri Sedar atau Gerwis yang berdiri pada tahun 1950 dengan anggota terdiri dari hanya 500

orang perempuan. Para anggota ini umumnya memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki kesadaran politik. Dilihati dari segi ideologi, organisasi ini merupakan organisasi kelanjutan dari Isteri Sedar. Pada umumnya perempuan dalam organisasi Gerwis ini usianya lebih muda, namun mereka memiliki hubungan dengan para perempuan yang bergabung dalam organisasi Isteri Sedar (Kuntulanak Wangi; Organisasi-organisasi Perempuan Sesudah Tahun 1950 [The Perfumed Nighthmare], 1998). KWI (Kongres Wanita Indonesia) saat itu menjadi badan koordinasi bagi semua organisasi perempuan.

PKK atau dikenal dengan Pembinaan Kesejahteraan keluarga telah berdiri sejak tahun 1957. Organisasi isteri pejabat kemudian terbagi dua menjadi Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi. Memasuki babak Orde Baru, organisasi perempuan mulai mengalami domestikasi. Orde Baru mengadopsi pendekatan Perempuan dalam Pembangunan (*Women In Development*, WID) yaitu upaya mendorong partisipasi dalam pembangunan. WID merupakan wacana dominan sejak 1960-an masa dimana wacana feminisme dan konsep gender mulai masuk mengglobal. Tahun 1990-an mulai berkembang organisasi perempuan, baik yang berbentuk LSM, Yayasan, Forum, Jaringan maupun Kelompok Mahasiswa.

Jika merujuk pada teori generasi Karl Mannheim (1893) maka di tiap rentang peristiwa melahirkan kelompok perempuan atau aktivis perempuan baik individu, kelompok maupun organisasi dengan bentuk, strategi dan tujuan

perjuangan yang berbeda sesuai masanya atau istilahnya adalah tiap masa ada generasinya. Menurut Karl Mannheim, yang dimaksud dengan generasi adalah sebuah kelompok dengan kesamaan rentang usia yang terdiri dari individu dan kelompok tersebut berpengalaman mengikuti peristiwa sejarah penting dalam suatu periode waktu yang sama (Karl Mannheim, 1923). (Samuel Theresia, 2017)

Saat ini adalah era 2022 , dimana zaman memasuki babak baru revousi industri 4.0 menuju 5.0 dan Pasca Pandemi atau Pasca *New Normal*. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan era teknologi internet yang serba cepat. The New Normal adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan Covid-19 (Putsanra, 2020). Adanya Covid-19 yang mulai mewabah di tahun 2019 hingga saat ini menuntut masyarakat Indonesia untuk bisa melek teknologi, sebab sebagian besar aktivitas dilakukan di dunia virtual. Aktivitas di dunia virtual bukan hanya bertujuan *Work From Home* (WFH) namun juga berkampanye dan melakukan kegiatan sosial lainnya, membantu sesama, memperjuangkan keadilan bagi perempuan dan masyarakat. Ilmu pengetahuan dituntut untuk dapat diaplikasikan secara nyata. Hal ini sejalan dengan pendapat Mayling Oey-Gardiner, menurutnya di masa depan, ilmu pengetahuan menjadi sarana untuk memperoleh suatu keterampilan, bukan tujuan. Orientasi keterampilan yang perlu diajarkan dalam pendidikan adalah pengambilan keputusan serta untuk menanggung risiko dan konsekuensi dari mengambil Tindakan (Gardiner, 2016).

Peranan kaum muda dalam artian generasi milenial sangat penting dalam era ini. Perempuan yang merupakan generasi milenial memiliki peluang dan tantangan guna mewujudkan kesetaraan gender dan tujuan SDGs. Kehadiran individu-individu milenial yang berpengaruh merupakan peluang untuk menyebar gagasan positif. Individu sebagai aktivis perempuan memiliki peranan besar dan penting dalam mewujudkan kesetaraan gender, sebagaimana di masa lalu individu seperti Cut Nyak Dien dan R.A Kartini memiliki peranan penting dalam berjuang melawan penjajah dan menggaungkan hak-hak perempuan, mereka telah menjadi *inspiring legend* dan senantiasa menjadi ikon perempuan milenial saat ini. Tentu ada peranan dan strategi yang berbeda antar generasi aktivis perempuan. Penting untuk mengkaji sejauh mana perbandingan peran dan strategi individu-individu aktivis perempuan untuk kemudian digunakan sebagai bahan bakar spirit perjuangan aktivis perempuan di masa mendatang atau sebagai bekal aktivis di generasi Z dan Alpha.

Untuk itu, tesis ini diberi judul :

**PERBANDINGAN PERAN AKTIVIS PEREMPUAN ANTAR GENERASI
PRA MILENIAL DENGAN MILENIAL UNTUK MENCAPAI KESETARAAN
GENDER**

B. RUMUSAN MASALAH

Peranan perempuan sebagai aktivis memiliki kontribusi yang sangat penting di negara ini. Dalam sejarah Indonesia, individu-individu perempuan

menjadi sosok legenda dan ikonik dalam perjuangan merebut kemerdekaan, memperjuangkan hak-hak perempuan dan emansipasi. Jika dahulu peran perempuan adalah memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajah Belanda maka di zaman sekarang perjuangan perempuan adalah untuk mencapai kesetaraan gender di berbagai bidang.

Sosok, peran dan kontribusi individu-individu perempuan ini penting untuk diketahui generasi penerusnya. Generasi-generasi di abad 18 memiliki jarak terpaut jauh dengan generasi saat ini, sehingga penelitian mengenai tesis ini akan mengambil sosok individu aktivis perempuan yang berada di era pra milenial atau disebut sebagai generasi X yaitu yang lahir di tahun 1960 – 1980 untuk dibandingkan dengan generasi milenial atau yang disebut generasi Y yang lahir di tahun 1980 – 2000. Kedua generasi ini menjadi generasi yang dominan mengawal perjuangan kesetaraan gender di abad 20. Perjuangan kesetaraan gender ini memiliki tujuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kelima atau dikenal sebagai *goal* kelima dalam SDG's

Untuk itu, penelitian ini akan memfokuskan penelitian pada masalah berikut, yaitu :

1. Bagaimana motivasi lahirnya perjuangan dari aktivis perempuan pra milenial dengan aktivis perempuan milenial dalam rangka mencapai kesetaraan gender?
2. Bagaimana perbandingan peran aktivis perempuan pra milenial dengan aktivis perempuan milenial untuk mencapai kesetaraan gender?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menjelaskan motivasi lahirnya perjuangan dari aktivis perempuan pra milenial dengan aktivis perempuan milenial untuk mencapai kesetaraan gender
2. Menjelaskan perbandingan peran aktivis perempuan pra milenial dengan aktivis perempuan milenial untuk mencapai kesetaraan gender

Hasil penelitian diharapkan bisa memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian gender utamanya kajian mengenai kesetaraan gender dalam mencapai tujuan kelima dari SDG's. Secara khusus, penulis juga membagi kegunaan penelitian dalam dua pokok :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai penelitian yang membahas tentang bentuk peran strategis aktivis perempuan pra milenial atau disebut sebagai generasi X yang berada di tahun 1960 - 1980 dan bentuk peran strategis aktivis perempuan generasi milenial atau disebut sebagai generasi Y yang berada di tahun 1980 - 2000 dalam mewujudkan kesetaraan gender untuk mencapai tujuan kelima dari SDGs.
 - b. Sebagai literatur pendukung dalam Studi Jender dan Pembangunan utamanya dapat menjadi rujukan mengenai bentuk peran strategis para aktor aktivis perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender dengan tujuan mencapai *goal* kelima dari SDG's

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi gelar magister Jender dan Pembangunan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran perbandingan antara peran strategis individu aktivis perempuan pra milenial dengan individu aktivis perempuan milenial dalam mewujudkan kesetaraan gender guna mencapai tujuan kelima dari SDGs.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian penulis, melalui *literature review* yang penulis lakukan, belum ada penelitian serupa yang dilakukan berkaitan dengan judul penelitian penulis. Namun untuk beberapa penelitian yang membahas variabel-variabel yang berkaitan, penulis memilih beberapa penelitian sebagai berikut :

1. Sosialisasi Peran Gender Aktivistis Perempuan Studi Kasus di Surabaya ditulis oleh Dwi Retnani Srinarwati. Tesis diterbitkan Perpustakaan Universitas Airlangga.

Penelitian ini mengkaji mengenai realitas perempuan di Indonesia yang mengalami ketimpangan dan ketidakberuntungan. Perempuan telah mengalami subordinasi, eksploitasi, pengabaian, bahkan tindak kekerasan. Aktivistis perempuan hadir melakukan pemberontakan atas ketidakberdayaan (*powerless*) perempuan. Melalui ideologi feminisme, aktivis perempuan berjuang di dunia. Gerakan aktivis perempuan kemudian masuk ke Indonesia melalui organisasi/LSM/Aktivistis perempuan. Penelitian ini juga menyinggung mengenai fungsi dan peran strategis aktivis perempuan untuk melakukan sosialisasi peran gender. Penelitian ini menggunakan Teori Konsep Gender, Feminisme dan Konsepsi mengenai siapakah yang disebut aktivis perempuan.

Penulis akan menjadikan penelitian ini sebagai salah satu rujukan literatur mengenai konsep gender, teori feminisme dan bagaimana peran aktivis perempuan. Penelitian ini juga akan menjadi salah satu rujukan definisi mengenai aktivis perempuan

2. Peran Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan *Woman in Sustainable Development* ditulis oleh Yusriani Sapta Dewi, Koordinator Aliansi Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Volume XII Nomor 02 September 2011

Penulis mengkaji mengenai pentingnya peran perempuan dalam pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini membahas pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai upaya kemampuan perempuan untuk mendapatkan serta memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pembangunan berkelanjutan. Disebutkan bahwa program pemberdayaan perempuan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup khususnya kaum perempuan dan peran sertanya diharapkan dapat aktif dalam masyarakat. Peran serta perempuan dalam pembangunan dinilai sangat penting dan turut menentukan berhasilnya pembangunan. Perempuan dikatakan memiliki kapasitas yang besar dalam memelihara dan melestarikan lingkungan serta mencegah tercemarnya lingkungan karena telah banyak bukti bahwa

perempuan telah mampu mengatasi masalah lingkungan di sekitarnya.

Penulis akan menjadikan penelitian ini sebagai salah satu rujukan berkaitan dengan peranan perempuan dalam SDGs, sebab judul penelitian yang penulis angkat akan membahas juga mengenai peran strategis aktivis perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender sebagai upaya mencapai tujuan kelima SDGs atau *Sustainable Development Goals*

3. Peran Strategis Aktivis Perempuan Nurul Jannah Al Firdaus dalam membentuk kesadaran beragama perempuan miskin kota ditulis oleh Hasyim Hasanah, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dipublikasikan oleh Jurnal Infrensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan.

Penelitian ini menggambarkan bagaimana peran strategis yang dilakukan aktivis perempuan bernama Nurul Jannah al-Firdaus dalam membentuk kesadaran beragama perempuan miskin kota. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan psiko-fenomenologi. Adapun hasil penelitian menunjukkan peran strategis aktivis perempuan Nurul Jannah dalam membentuk kesadaran beragama perempuan miskin kota yang mana indikatornya adalah keterlibatan aktif melalui pendampingan, pendidikan, pembelajaran, sehingga tumbuh kemandirian, dan

kesadaran dalam melaksanakan praktik ritual agama pada perempuan miskin perkotaan.

Penulis akan menjadikan penelitian ini sebagai salah satu rujukan metode penelitian untuk meneliti individu-individu aktivis perempuan baik yang berada di era pra milenial atau generasi X maupun yang berada di generasi milenial atau generasi Y.

4. Tantangan mewujudkan kesetaraan gender dalam budaya patriarki ditulis oleh Nanang Hasan Susanto, Dosen STAIN Pekalongan. Dipublikasikan oleh Jurnal Kajian Gender Muwazah.

Penelitian ini memfokuskan pada isu kesetaraan Gender (*gender equality*). Penelitian ini juga menggunakan teori gender dan membahas patriarki sebagai tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Penelitian ini juga membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Disebutkan diantaranya adalah dengan melalui jalur pendidikan; pemberian dan pemenuhan akses yang cukup kepada perempuan, melakukan kontrol terhadap setiap kebijakan yang dianggap bias gender, melibatkan perempuan dapat berpartisipasi serta memberikan benefit yang adil kepada laki-laki dan perempuan.

Penulis akan menjadikan penelitian ini sebagai salah satu rujukan literatur dengan mengambil konsep patriarki sebagai sebuah tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender

5. Perbedaan Work Engagement pada Generasi X dan Generasi Y di PT Spindo.Tb ditulis Brian Rizki Pratama. Skripsi Thesis, Universitas Airlangga

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan *work engagement* atau persepsi diri para karyawan yang terkait dengan emosi positif yang mereka miliki di tempat kerja serta keterlibatan diri mereka secara penuh terhadap pekerjaan di bidangnya masing-masing pada generasi X dan generasi Y di PT. Spindo Tbk. Metodologi penelitian ini menggunakan teknik *sampling probability* dengan jenis *proportionate stratified random sampling*.

Penulis akan mengambil penelitian ini sebagai rujukan untuk metodologi penelitian dalam tesis ini.

6. Pemaknaan Loyalitas Karyawan pada Generasi X dan Generasi Y (Studi Pada Karyawan di Indonesia) ditulis oleh Ayu Dwi Nindyati, Universitas Paramadina. Dipublikasikan oleh Journal of Psychological Science and Profesion (JPSP) Vol.1, No.1, Desember 2017

Penelitian ini mengkaji mengenai karakteristik angkatan kerja generasi X dengan generasi Y. Penelitian menjelaskan bahwa masing-masing generasi memiliki karakteristik dan perbedaan. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai generasi matures (lahir sebelum tahun 1945), baby boomers (lahir dari tahun 1945 – 1962),

gen X (1963 – 1982), gen Y (1983 – 1997) dan gen Z yang pada umumnya lahir setelah tahun 2000. Penggolongan generasi karyawan tersebut menambah keragaman bukan hanya terbatas pada jenis kelamin, pendidikan, agama maupun budaya namun juga dalam angkatan kerja,

Penulis akan menjadikan penelitian ini sebagai salah satu rujukan utamanya dalam melihat perbedaan mendasar antara generasi X sebagai generasi pra milenial dengan generasi Y yang merupakan generasi milenial.

7. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif dan Pemberdayaan Psikologis terhadap Komitmen Afektif dari Karyawan Generasi Y pada Industri Perbankan di Kota Padang ditulis oleh Arly Anita. Diploma Thesis, Universitas Andalas

Penulis dalam penelitian ini mengkaji mengenai karakteristik dari generasi veteran, baby boomers, generasi X dan generasi Y. Teori yang digunakan adalah teori generasi. Dari karakteristik tiap generasi didapatkan perbedaan gaya kepemimpinan antar generasi. Dalam hal ini, penulis akan menjadikan penelitian ini sebagai salah satu rujukan literatur utamanya dalam hal teori generasi.

B. Latar Belakang Teori

Penulis menggunakan beberapa landasan teori dalam penelitian ini, di antaranya yaitu Teori Peran, Teori Generasi dan Teori Feminisme. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Teori Peran

Teori Peran merupakan sebuah sudut pandang dalam ilmu sosiologi dan psikologi sosial yang memiliki anggapan bahwa sebagian besar aktivitas yang dilakukan seseorang hari-hari diperankan dengan menggunakan kategori-kategori yang dipakemkan secara kultur dan sosial. Dalam artian bahwa setiap peran sosial merupakan serangkaian hak, kewajiban, adapula harapan, norma, serta perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Ini berdasar kepada penilaian akan tindakan orang-orang dengan memprediksi bahwa sikap dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan tempatnya berada dan berdasar pada status sosial dan faktor lainnya. Kiasan yang biasa digunakan untuk menggambarkan sebuah teori peran adalah teater.

Menurut Soerjono Soekanto, pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Suhardono dalam Patoni, mengungkapkan tentang peran, bahwa peran dapat dijelaskan dengan berbagai yaitu: *pertama*, penjelasan historis: konsep peran secara historis dipinjam dari kalangan yang memiliki keterkaitan dengan drama dan teater yang tumbuh subur di era Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran mengandung pengertian sebagai karakter yang melekat atau

dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama dengan watak tertentu. *Kedua*, pengertian peran menurut ilmu sosial yaitu suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dan struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut (Wafi, 2020). Dalam pengertiannya yang lain, peran merupakan batasan yang dirancang oleh aktor lain yang berada dalam satu penampilan atau disebut *role performance* (Suhardono, 1994)

Penulis akan menggunakan teori peran di atas sebagai landasan untuk membahas peran aktivis perempuan baik yang berada di era pra milenial atau bisa disebut generasi X dan yang berada di generasi milenial atau bisa disebut generasi Y. Dalam kaitannya dengan definisi peran di atas, maka aktivis perempuan diharapkan mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan juga turut memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara. Dalam kaitannya dengan judul penelitian penulis maka peranan aktivis perempuan akan lebih banyak membahas mengenai bagaimana aktivis perempuan memperjuangkan hak-hak perempuan agar kesetaraan gender dapat terwujud.

2. Teori Generasi

Teori generasi atau disebut *theory of generations or sociology of generations*) pertama kali diutarakan oleh seorang sosiolog asal

Hungaria yang bernama Karl Mannheim. Ia menulis sebuah esai yang berjudul “*The Problem of Generations*” pada tahun 1923. Sejak munculnya *Generation Theory* (Teori Generasi) sampai saat ini dikenal beberapa istilah generasi antara lain *Baby Boomers*, Generasi X, Generasi Y dan Generasi Z. Menurut Karl Mannheim sebuah generasi memiliki kesamaan dalam rentang usia serta mengikuti peristiwa sejarah dalam periode yang sama. Mannheim (1952) menjelaskan bahwa individu yang menjadi bagian dari satu generasi tersebut memiliki kesamaan tahun lahir dalam rentang waktu 20 tahun serta berada dalam dimensi sosial dan dimensi sejarah yang sama.

Teori generasi juga disebut dengan istilah Kohort yaitu orang-orang yang memiliki tahun kelahiran pada titik yang sama dan akan mengalami kejadian hidup dengan cara yang sama. Pembagian Generasi secara umum meliputi Generasi Veteran (1925-1946), Generasi Baby Boom (1946-1960), Generasi X (1960-1980), Generasi Y (1980-1995), Generasi Z (1995-2010), dan Generasi Alfa (2010-sekarang). Saat ini generasi yang mendominasi dunia digital adalah generasi Y atau milenial. Generasi yang peranannya dominan di era internet ini adalah generasi Y atau generasi milenial. Generasi milenial memiliki pola komunikasi yang lebih terbuka dibandingkan generasi pendahulunya. Generasi ini terbentuk dari berkembangnya ilmu teknologi dan informasi. . Generasi Y sering

disebut dengan *Millenial Generation*, yaitu kelompok muda yang lahir awal 1980 hingga awal 2000 (Horovitz, 2012). Sedangkan generasi X atau generasi pra milenial digambarkan sebagai generasi pekerja keras, patuh akan aturan dan juga setia. Generasi X adalah generasi yang lahir pada tahun – tahun awal dari perkembangan teknologi dan informasi. Berbeda dengan generasi X, generasi Y tumbuh pada saat internet booming.

Beberapa tokoh ilmuwan sosial memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai rentang waktu generasi namun secara umum berkisar 20 tahun. Penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan seperti Csikos, Bencsik, dan Juhez (2016) memasukkan Generasi Z di dalam kelompok generasi.

Penulis akan memakai teori yang dikembangkan Bencsik, Csikos, dan Juhez (2016) dan memadukan dengan teori dasar dari Karl Mannheim dalam hal membandingkan peran aktivis perempuan pra milenial atau disebut sebagai generasi X dengan aktivis perempuan milenial atau disebut generasi Y. Dalam artian fokus penelitian akan mengacu pada aktivis perempuan yang berada di rentang waktu 1960 – 1980 untuk generasi pra milenial atau generasi X dan 1980 – 2000 untuk yang berada di generasi milenial atau generasi Y.

3. Teori Feminisme

Feminisme identik dengan sebuah gerakan baik itu gerakan sosial, politik serta sebagai sebuah suatu Gerakan yang berkaitan dengan ideologi yang memiliki tujuan untuk mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Sedangkan menurut Prof. Gadis Arivia, feminisme merupakan sebuah teori sekaligus praktik (Gadis Arivia, 2004) dan gerakan feminisme ini ditujukan bukan hanya untuk perempuan namun juga laki-laki (Ayu Utami, 2016).

Feminisme sendiri secara umum tidak memiliki konsep tunggal. Menurut Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, feminis dari Asia Selatan, feminisme sangat bergantung dari ruang dan konteks yang menjadi landasan pengalaman perempuan tersebut. Feminisme sendiri bertujuan untuk menciptakan keadilan bukan hanya bagi perempuan tetapi masyarakat pada umumnya. Itulah mengapa ada banyak aliran feminisme. Sebut saja Marxis, radikal, sosialis, dan liberal.

Agenda feminis *mainstream* semenjak awal abad ini hingga sekarang adalah bagaimana mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif, yaitu perempuan dan laki-laki harus sama-sama (*fifty-fifty*) berperan baik di luar maupun di dalam rumah. Para feminis masih percaya bahwa perbedaan peran berdasarkan gender adalah karena produk budaya, bukan karena adanya perbedaan

biologis atau perbedaan *nature* atau genetis. (Ratna Megawangi dalam Membiarkan Berbeda, 1999)

Penulis akan memakai Teori Feminisme untuk melihat sejauh mana pendekatan ini dipakai dalam mewujudkan kesetaraan gender di segala bidang capaian yang ditarget dalam tujuan kelima SDGs. Teori Feminisme akan memiliki banyak aliran dan menurut pandangan penulis, setiap aliran memiliki kontribusi terhadap perubahan sosial yang bermanfaat untuk keadilan sosial.

C. Kerangka Konsep

Penelitian ini berjudul Studi Perbandingan Peran Strategis Antar Generasi Aktivistis Perempuan Pra Milenial dengan Milenial untuk Mencapai Kesetaraan Gender dalam Upaya Perwujudan Tujuan Kelima SDG's di Indonesia. Berdasarkan judul penelitian ini, penulis menggunakan beberapa konsep, yaitu sebagai berikut :

1. Konsep Aktivistis Perempuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 2020), aktivis merupakan individu atau sekelompok orang, apakah ia masuk anggota dari kelompok sosial, buruh, politik, petani, pemuda, kelompok perempuan atau mahasiswa yang aktif bekerja untuk mendorong terlaksananya suatu kegiatan di dalam organisasinya sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, aktivis disebut sebagai orang yang menggerakkan misalnya dalam demonstrasi dan sebagainya. Jika merujuk pada individu sebagai aktivis perempuan maka dapat

didefinisikan eksistensi perempuan merupakan sebuah rangkaian tindakan yang dilakukan baik itu oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yaitu kesetaraan gender. Sehingga dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa aktivis perempuan adalah individu atau orang yang tergabung dalam sebuah organisasi, lembaga atau wadah yang aktif mendorong kesetaraan gender sebagai sebuah tujuan yang ingin dicapainya.

Dalam hal ini, penulis akan memfokuskan penelitian kepada individu aktivis perempuan yang berada di rentang waktu 1960 – 1980 untuk generasi pra milenial atau generasi X dan di rentang waktu 1980 – 2000 untuk yang berada di generasi milenial atau generasi Y. Untuk beberapa Lembaga atau organisasi yang aktif memperjuangkan kesetaraan gender juga akan menjadi perhatian penulis seperti Komnas Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, KAPAL Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia, LBH Apik, dan Lembaga maupun Organisasi serta Komunitas atau Yayasan lainnya.

2. Konsep Kesetaraan Gender

Dalam memahami konsep kesetaraan gender, perlu dipahami terlebih dahulu konsep gender. Gender mengacu pada ketetapan yang diberikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan sehingga terdapat perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki dan hal ini

dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Ketidakadilan gender adalah kondisi tidak adil yang diakibatkan oleh sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut.

Menurut Nasaruddin Umar, gender dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang digunakan dari sudut pandang nonbiologis untuk mengidentifikasi bagaimana perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. (Susanto, 2015)

Dunia telah memasuki abad millennium, namun keberpihakan dunia terhadap perempuan belum mencapai perubahan yang signifikan secara global. Mengkaji permasalahan ketidakadilan gender erat kaitannya dengan permasalahan keadilan. Secara umum para feminis menginginkan kesetaraan gender dalam artian kesetaraan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dalam mengukur pencapaian kesetaraan gender maka digunakan indikator yaitu indikator pembangunan manusia (*Human Development Index* atau HDI). Di dalam konsep HDI termuat indikator untuk mengukur kesetaraan gender yaitu konsep kesetaraan gender (*gender equality*). GDI atau *Gender Development Index* adalah perhitungan yang dipakai, yaitu kesetaraan antara pria dan perempuan dalam usia harapan hidup, pendidikan, dan jumlah pendapatan serta GEM (*Gender Empowerment Measure*) yang

mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan dalam beberapa sektor lainnya. Jika ketika diukur GDI dan GEM adalah 1 maka telah terjadi *perfect equality*.

Beberapa Indikator kesetaraan gender antara lain:

1. Angka perempuan yang diterima di akademi militer
2. Persentase perempuan di parlemen
3. Angka perempuan yang mengisi posisi di perusahaan
4. Angka perempuan yang melek huruf
5. Angka penghasilan perempuan
6. Angka partisipasi tenaga kerja

Di Indonesia persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan telah dijamin dalam GBHN sejak tahun 1978. Selain itu UU No. 7 tahun 1984 yang menghapuskan segala macam praktik diskriminasi terhadap perempuan merupakan penerimaan konvensi PBB untuk menghilangkan segala diskriminasi perempuan, yang dikenal dengan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Selanjutnya beragam kebijakan lahir untuk melindungi hak-hak perempuan, sejalan dengan itu upaya mengawal regulasi dan kebijakan ini tetap harus dilakukan oleh para aktivis perempuan sebab tidak jarang bahkan banyak kasus yang terjadi *law in book* tidak sejalan dengan *law in action*. Masih dirasakan adanya diskriminasi kultural, diskriminasi

politik, dan diskriminasi ekonomi. Fakta-fakta ini didukung oleh data statistik. Data statistik dapat memberikan sebuah visualisasi tentang keadaan perempuan. Ketimpangan dalam data statistik selalu diidentikkan dengan adanya diskriminasi atau usaha untuk memarjinalisasi perempuan yang mana ini adalah bias gender, sehingga melihat hal ini upaya mencapai kesetaraan gender di segala aspek kehidupan harus tetap diperjuangkan.



D. Kerangka Pikir

